



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJIYATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM
3. NHK : 932439

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **480.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **84.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF 125/KARISMA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **133.807.433**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **697.807.433**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **697.807.433**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.